

Peran Kepemimpinan dalam Mewujudkan Good Governance Pendidikan Islam

Riza Kurnia¹, Saidina², Kasinyo Harto³, Tutut Handayani⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: Riza Kurnia, e-mail: rizakurina37@gmail.com

Published: October , 2025

ABSTRACT

Background: The dynamics of Islamic educational institution management in the contemporary era face complex challenges that demand leadership transformation based on accountable and transparent governance. Empirical phenomena indicate that management crises in Islamic educational institutions often stem from weak good governance practices, reflected in minimal accountability, transparency, and stakeholder participation in strategic decision-making. This situation is exacerbated by resistance to change, limited human resource competencies, and technological infrastructure gaps that hinder educational effectiveness.

Purpose: This study aims to analyze the concept of leadership in Islamic education perspectives and its relevance to good governance principles, describe the implementation of good governance in contemporary Islamic educational institutions, identify leadership roles in realizing good governance, and analyze challenges faced by Islamic educational leaders in implementing good governance principles.

Method: This research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing systematic content analysis of primary sources including national and international reputable journal articles published between 2020-2025, and secondary sources comprising textbooks, research reports, and policy documents related to Islamic educational leadership and good governance.

Results and Discussion: The findings confirm that Islamic leadership foundations based on amanah, al-'adalah, syura, and uswah hasanah principles demonstrate significant alignment with modern good governance principles encompassing transparency, accountability, participation, and responsiveness. Leadership functions as a transformative change agent in operationalizing good governance through strategic planning mechanisms, organizing, motivation, and systematic supervision. However, implementation faces internal challenges including limited HR competencies, organizational culture resistance, and stakeholder conflicts, as well as external challenges involving regulatory changes, funding limitations, and high societal expectations.

Conclusion and Recommendation: The spiritual-transformational leadership model proves to be an effective contextual approach in integrating moral-spiritual dimensions with managerial aspects to create sustainable and responsive governance. It is recommended that Islamic educational leaders develop managerial and technological competencies through continuous training programs, prioritize transparent management information systems, build organizational culture supporting good governance values, and develop funding diversification strategies to enhance institutional competitiveness.

Keywords: Accountability, Good Governance, Islamic Education, Leadership, Transparency

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dinamika pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era kontemporer menghadapi tantangan kompleks yang menuntut transformasi kepemimpinan berbasis tata kelola yang akuntabel dan transparan. Fenomena empiris menunjukkan bahwa krisis manajemen pada institusi pendidikan Islam sering kali berakar pada lemahnya praktik *good governance*, yang tercermin dari minimnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini diperparah oleh resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta kesenjangan infrastruktur teknologi yang menghambat efektivitas penyelenggaraan

pendidikan. Temuan (Bahri, 2022) mengungkapkan bahwa kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam di era pandemi mengalami penurunan signifikan akibat ketidaksiapan kepemimpinan dalam mengadaptasi sistem tata kelola berbasis digital dan partisipatif. Lebih lanjut, studi (Hifza et al., 2022) menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam masih cenderung bersifat hierarkis dan kurang mengintegrasikan prinsip *syura* (musyawarah) yang menjadi nilai fundamental dalam Islam, sehingga menciptakan kultur organisasi yang kurang inklusif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Urgensi penerapan *good governance* dalam pendidikan Islam semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pendidikan yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. (Rosalina & Khoiri, 2025) menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun kultur *good governance* melalui internalisasi nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*'adalah*), dan akuntabilitas yang diajarkan dalam ajaran Islam. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kepemimpinan lembaga pendidikan Islam masih menghadapi kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas empiris. (Rusydi, 2023) mengidentifikasi bahwa meskipun konsep *good governance* memiliki landasan teologis yang kuat dalam perspektif Islam, transformasi konseptual tersebut ke dalam sistem manajerial belum sepenuhnya terealisasi, terutama dalam aspek transparansi keuangan, partisipasi komunitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Situasi ini mengindikasikan adanya *gap* antara pemahaman filosofis tentang kepemimpinan Islami dengan aplikasi konkret dalam tata kelola institusional yang modern dan profesional.

Kepemimpinan menjadi variabel determinan dalam mewujudkan *good governance* pendidikan Islam karena pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang mengarahkan visi organisasi, membangun kultur partisipatif, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap lini operasional. Penelitian (Hamdanah et al., 2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner yang berakar pada nilai-nilai spiritual Islam berkontribusi signifikan terhadap modernisasi dan profesionalisasi tata kelola *pesantren*, dengan meningkatkan koordinasi kelembagaan, kredibilitas institusi, serta membuka jalur baru untuk pengembangan pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan. Di sisi lain, (Arar et al., 2022) melalui tinjauan komprehensif terhadap literatur kepemimpinan pendidikan berbasis Islam sejak tahun 1990, mengungkapkan bahwa penelitian tentang model kepemimpinan Islami masih terbatas dan belum menghasilkan kerangka teoritis yang kokoh untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik manajemen pendidikan modern. Kesenjangan riset ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan dapat menjadi katalisator dalam transformasi tata kelola pendidikan Islam menuju sistem yang lebih akuntabel, transparan, responsif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi pemahaman komprehensif tentang sinergi antara kepemimpinan transformatif dan implementasi prinsip *good governance* dalam konteks pendidikan Islam melalui pendekatan studi pustaka yang sistematis dan kritis. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial dan deskriptif, penelitian ini berupaya mengintegrasikan dimensi teologis, manajerial, dan sosio-kultural dalam menganalisis peran kepemimpinan sebagai pilar utama tata kelola pendidikan Islam yang efektif dan berkelanjutan. Studi ini juga mengisi kekosongan literatur dengan mengeksplorasi tantangan kontemporer yang dihadapi pemimpin pendidikan Islam, termasuk adaptasi terhadap digitalisasi, pemberdayaan komunitas, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika global tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai fundamental Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model kepemimpinan pendidikan Islam yang responsif terhadap tuntutan *good governance* di era modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif pendidikan Islam dan relevansinya dengan prinsip *good governance*?, Bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era kontemporer?, Apa peran kepemimpinan dalam mewujudkan *good governance*

pada lembaga pendidikan Islam?, dan Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi pemimpin pendidikan Islam dalam mengimplementasikan prinsip *good governance*?. Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis konsep kepemimpinan dalam perspektif pendidikan Islam dan relevansinya dengan prinsip *good governance*, Mendeskripsikan implementasi *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era kontemporer, Mengidentifikasi peran kepemimpinan dalam mewujudkan *good governance* pada lembaga pendidikan Islam, Menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi pemimpin pendidikan Islam dalam mengimplementasikan prinsip *good governance*.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah keilmuan manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam ranah kepemimpinan dan tata kelola institusional. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara kepemimpinan transformatif dan implementasi *good governance* dalam konteks pendidikan Islam, serta memperkaya diskursus tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik manajemen pendidikan modern yang profesional dan akuntabel. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan strategis bagi pemimpin lembaga pendidikan Islam dalam merancang dan mengimplementasikan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pengambil kebijakan pendidikan Islam dalam merumuskan regulasi dan program pengembangan kapasitas kepemimpinan yang berorientasi pada penguatan *good governance*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi komunitas pendidikan Islam untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis demi terwujudnya institusi pendidikan Islam yang berkualitas, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika perkembangan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang tersedia, seperti buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian, tanpa memerlukan riset lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis teoretis dan konseptual mengenai peran kepemimpinan dalam mewujudkan *good governance* pendidikan Islam melalui telaah mendalam terhadap berbagai literatur yang telah dipublikasikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari dan Asmendri (2020), penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun informasi dan data dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, yang kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi yang membahas secara spesifik tentang kepemimpinan pendidikan Islam, *good governance*, dan tata kelola institusi pendidikan Islam yang diterbitkan pada rentang tahun 2020 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu publikasi ini dimaksudkan untuk memastikan relevansi dan aktualitas data dengan kondisi kontemporer yang menjadi fokus kajian penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku teks, monograf, laporan penelitian, prosiding konferensi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data akademik seperti *Google Scholar*, *DOAJ (Directory of Open Access Journals)*, *Science Direct*, *ERIC (Education Resources Information Center)*, dan repositori institusi untuk mengidentifikasi literatur yang relevan dengan kata kunci kepemimpinan (*leadership*), pendidikan Islam (*Islamic education*), *good governance*, tata kelola (*governance*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan konsep-konsep kunci yang terdapat dalam literatur yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, tema, dan relasi teoretis antara kepemimpinan dan

good governance dalam konteks pendidikan Islam. Tahapan analisis data meliputi: pertama, membaca secara kritis dan mendalam seluruh literatur yang telah terkumpul untuk memahami substansi dan argumentasi yang dikemukakan oleh para penulis; kedua, mengidentifikasi konsep-konsep utama, teori, dan temuan empiris yang relevan dengan rumusan masalah penelitian; ketiga, mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema tertentu seperti konsep kepemimpinan Islami, prinsip-prinsip *good governance*, implementasi tata kelola, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi; keempat, melakukan sintesis dan komparasi antar literatur untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan *gap* dalam kajian yang ada; kelima, menginterpretasikan temuan secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data yang dianalisis, serta melalui proses *peer debriefing* dengan mengkonsultasikan hasil analisis kepada ahli di bidang manajemen pendidikan Islam. Penelitian studi kepustakaan ini memiliki beberapa keunggulan metodologis, antara lain memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis sejumlah besar literatur dalam waktu yang relatif efisien, memberikan perspektif teoretis yang luas dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memfasilitasi identifikasi *gap* penelitian dan pengembangan kerangka konseptual yang komprehensif (Abdurrahman, 2024). Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan ketergantungan pada ketersediaan literatur yang dapat diakses dan kemungkinan adanya bias publikasi yang memengaruhi hasil analisis. Untuk meminimalkan keterbatasan tersebut, peneliti melakukan seleksi literatur secara sistematis dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, serta memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan berasal dari publikasi yang kredibel dan bereputasi (Ernawati et al., 2024; Sari & Khaidir, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Prinsip Good Governance

a) Fondasi Teologis dan Filosofis Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam konteks pendidikan Islam memiliki landasan teologis yang kuat yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW. Fondasi kepemimpinan Islami dibangun atas prinsip-prinsip fundamental yang mencakup *amanah*, keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), dan keteladanan (*uswah hasanah*). (Rusydi, 2023) menegaskan bahwa esensi tata kelola yang baik menurut perspektif Al-Qur'an terletak pada dua prinsip utama yakni *al-amanah* (kepercayaan) dan *al-'adalah* (keadilan), dimana kejujuran dan keadilan menjadi basis fundamental bagi pemimpin yang baik dalam menjalankan pemerintahannya. Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep normatif, melainkan merupakan panduan operasional yang harus diinternalisasikan dalam setiap praktik kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. (Handayani et al., 2025) menjelaskan bahwa nilai-nilai inti seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, musyawarah, dan perilaku teladan merupakan fondasi esensial yang harus diinternalisasikan oleh setiap pemimpin pendidikan Islam. Model kepemimpinan profetik yang menekankan dimensi moral dan spiritual dianggap ideal untuk mengembangkan institusi pendidikan yang transformatif dan kompetitif. Dimensi spiritual dalam kepemimpinan Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek manajerial, sebagaimana ditegaskan oleh (Muhammad Nur Kurma, 2024) bahwa pemimpin dengan orientasi spiritual dan transformasional mampu menanamkan nilai-nilai religius, membangun visi kolektif, serta mendorong inovasi berkelanjutan dalam pembelajaran dan manajemen mutu. Dimensi idealisme, makna kerja, dan keteladanan moral menjadi penggerak utama tumbuhnya budaya mutu yang hidup dan dinamis. Fondasi teologis ini memberikan kerangka etis yang komprehensif dalam membentuk karakter kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara administratif namun juga bermakna secara spiritual.

b) Relevansi Kepemimpinan Islami dengan Prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam memiliki keselarasan yang signifikan dengan konsep *good governance* modern yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. (Bahri et al., 2025) menganalisis bahwa manajemen pendidikan Islam mengedepankan

pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif dan berfokus pada pengembangan karakter, dimana pendekatan berbasis nilai-nilai Islam diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep *amanah* dalam Islam sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam *good governance*, sementara musyawarah (*syura*) resonan dengan prinsip partisipasi dan demokrasi. (Khairani & Hasibuan, 2024) menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan Islam harus berlandaskan pada kombinasi kemampuan manajerial dan nilai-nilai Islam seperti keadilan, *amanah*, dan *ihsan*, dimana pemimpin yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan akhlak mulia. (Alfiannur et al., 2022) memperkuat argumen ini dengan menemukan bahwa kepemimpinan berbasis prinsip-prinsip Islam seperti *amanah*, keadilan, dan musyawarah dapat memperkuat tata kelola lembaga pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter siswa. Relevansi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islami bukan hanya kompatibel dengan prinsip *good governance* modern, tetapi justru dapat memperkaya dan memperdalam implementasinya dalam konteks lembaga pendidikan Islam. (Abdullah & Burhanuddin, 2023) menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam menciptakan *good governance* dilakukan dengan menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, demokrasi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan prima yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Era Kontemporer

a) Dimensi dan Indikator Good Governance dalam Lembaga Pendidikan Islam

Implementasi *good governance* dalam lembaga pendidikan Islam memerlukan identifikasi dimensi dan indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas tata kelola institusional. Rusydi (2023) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik dan efektif dari perspektif Islam didasarkan pada *syariah* dan *siyasah shar'iyah*, dimana *siyasah shar'iyah* merupakan tata kelola dan kebijakan politik Islam dalam menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dimensi fundamental *good governance* dalam pendidikan Islam mencakup aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kinerja, partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. (Bahri et al., 2025) menekankan bahwa manajemen pendidikan Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas dari ajaran Islam dapat menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Indikator keberhasilan implementasi *good governance* tidak hanya diukur dari aspek administratif tetapi juga dari dampaknya terhadap pengembangan karakter peserta didik dan kepuasan stakeholder. (Nurindah, 2024) mengidentifikasi bahwa fungsi pemimpin dalam pendidikan agama Islam meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dimana pemimpin harus mampu merumuskan visi dan misi lembaga yang sejalan dengan nilai-nilai agama serta memotivasi dan memberdayakan tenaga pendidik. Dimensi integritas moral dan spiritual pemimpin menjadi indikator penting yang membedakan *good governance* dalam perspektif Islam dengan model tata kelola konvensional.

b) Praktik Implementasi Good Governance pada Berbagai Jenis Lembaga Pendidikan Islam

Praktik implementasi *good governance* pada lembaga pendidikan Islam menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada jenis, skala, dan konteks institusional. (Astani et al., 2024) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan standar pendidikan, ketua perguruan tinggi Islam swasta menjalankan berbagai tanggung jawab utama meliputi tugas manajerial, pengembangan kualitas dan keberlanjutan akademik, mendorong kewirausahaan kampus, memberikan motivasi, dan mengoptimalkan alokasi tanggung jawab di antara dosen dan staf. Pada level madrasah dan sekolah Islam, implementasi *good governance* sering difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan budaya religius, dan pembangunan kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Illah et al. (2022) mendeskripsikan bahwa kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan

profesionalisme guru dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan pengumpulan ide, pembentukan tim pengembangan kurikulum, dan penentuan program penilaian sebagai basis implementasi evaluasi. Syahlarriyadi (2023) menegaskan bahwa peran pemimpin lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas dapat dilakukan dengan pola pemikiran sistemik dengan menganalisis bagian-bagian sistem untuk kemudian menemukan pola hubungan yang terkandung dalam setiap elemen pembentuk sistem. Praktik-praktik terbaik menunjukkan bahwa implementasi *good governance* yang sukses memerlukan komitmen kepemimpinan yang kuat, sistem manajemen yang transparan, dan budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Good Governance dalam Lembaga Pendidikan Islam

Dimensi	Indikator Utama	Nilai Islam yang Relevan
Transparansi	Keterbukaan informasi keuangan, kebijakan akademik, dan proses pengambilan keputusan	<i>Amanah, kejujuran (sidiq)</i>
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder, evaluasi berkala, sistem pelaporan yang jelas	<i>Amanah, tanggung jawab</i>
Partisipasi	Keterlibatan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi	Musyawarah (syura), demokrasi
Efektivitas	Pencapaian tujuan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan karakter siswa	<i>Itqan (profesionalisme), ibsan</i>
Keadilan	Perlakuan yang adil terhadap semua stakeholder, distribusi sumber daya yang merata	<i>Adalah (keadilan)</i>

Sumber: Diolah dari . (Rusydi, 2023),(Bahri et al., 2025),(Handayani et al., 2025)

Peran Kepemimpinan dalam Mewujudkan Good Governance pada Lembaga Pendidikan Islam

a) Kepemimpinan sebagai Agen Transformasi Tata Kelola Institusional

Kepemimpinan memainkan peran sentral sebagai agen transformasi dalam mewujudkan *good governance* pada lembaga pendidikan Islam. (Wahyudi et al., 2021) menegaskan bahwa keberhasilan sekolah bergantung pada manajemen yang efektif, dan manajemen yang efektif bergantung pada kepemimpinan profesional, dimana tanggung jawab pemimpin sebagai manajer meliputi perencanaan dan evaluasi, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pemimpin pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai administrator tetapi juga sebagai *change agent* yang mampu mengubah paradigma dan budaya organisasi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Muhammad Nur Kurma, 2024) menunjukkan bahwa model kepemimpinan spiritual-transformasional merupakan pendekatan yang efektif dan kontekstual dalam menghadapi tantangan manajerial lembaga pendidikan Islam di era disrupsi. Transformasi tata kelola memerlukan kepemimpinan yang visioner, yang mampu merumuskan visi jangka panjang yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan kontemporer. (Khairani & Hasibuan, 2024) menjelaskan bahwa fungsi perencanaan berfokus pada penyusunan visi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sementara pengorganisasian mencakup penyusunan struktur kerja yang efektif, dan fungsi pengarahan berperan dalam memotivasi staf dan peserta didik untuk mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan transformatif juga harus mampu membangun kapasitas organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem manajemen, dan penciptaan budaya pembelajaran yang berkelanjutan.

b) Mekanisme Kepemimpinan dalam Operasionalisasi Prinsip Good Governance

Operasionalisasi prinsip *good governance* memerlukan mekanisme kepemimpinan yang sistematis dan terstruktur. (Mujib & Ali, 2022) mengidentifikasi bahwa fungsi manajemen pendidikan Islam mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan pengawasan, dimana untuk mengatasi konflik internal diperlukan profesionalisme pemimpin untuk

membedakan antara kepentingan personal dan kepentingan institusional. Mekanisme ini dimulai dari tahap perencanaan strategis yang melibatkan seluruh stakeholder, penetapan indikator kinerja yang jelas, implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, hingga pelaporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Astani et al. (2024) menunjukkan bahwa pemimpin perguruan tinggi Islam menjalankan tugas manajerial, pengembangan kualitas akademik, mendorong kewirausahaan kampus, memberikan motivasi, dan mengoptimalkan alokasi tanggung jawab. Mekanisme kepemimpinan juga mencakup pembangunan sistem komunikasi yang efektif, pengembangan kebijakan yang transparan, dan penciptaan mekanisme partisipasi yang inklusif. Abdullah dan Burhanuddin (2023) menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan yang memiliki peran dan fungsi tertentu dalam mempengaruhi dan memotivasi masyarakat sekolah sangat mudah untuk menciptakan *good governance* melalui beberapa strategi yang dapat dilakukan. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, pengembangan kultur akuntabilitas, serta pemberdayaan stakeholder menjadi elemen kunci dalam mekanisme operasionalisasi *good governance*.

Tabel 2. Peran dan Fungsi Kepemimpinan dalam Mewujudkan Good Governance

Peran Kepemimpinan	Fungsi Utama	Dampak terhadap Good Governance
Agen Transformasi	Mengubah paradigma dan budaya organisasi	Terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas
Perencana Strategis	Merumuskan visi, misi, dan strategi institusional	Arah pengembangan yang jelas dan terukur
Pengorganisasi	Membangun struktur dan sistem yang efektif	Efisiensi dan efektivitas operasional
Motivator	Memberdayakan dan menginspirasi stakeholder	Partisipasi aktif dan komitmen bersama
Pengawas	Monitoring dan evaluasi kinerja	Akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan

Sumber: Diolah dari (Khairani & Hasibuan, 2024), (Mujib & Ali, 2022), (Wahyudi et al., 2021)

Tantangan dan Hambatan dalam Mengimplementasikan Prinsip Good Governance oleh Pemimpin Pendidikan Islam

a) Tantangan Internal Kelembagaan

Implementasi *good governance* dalam lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan internal yang kompleks. (Alfiannur et al., 2022) mengidentifikasi bahwa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan perubahan sosial menjadi hambatan utama yang memerlukan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam aspek manajerial dan teknologi, menjadi kendala signifikan dalam implementasi sistem tata kelola yang modern. (Mujib & Ali, 2022) mencatat bahwa masalah yang sering terjadi dalam institusi pendidikan Islam meliputi konflik internal, konflik antara pemimpin madrasah dengan ketua yayasan, konflik antara pemimpin madrasah dengan guru, dan konflik terkait pendanaan operasional madrasah. Resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan internal yang signifikan, dimana sebagian stakeholder masih mempertahankan pola manajemen tradisional yang kurang transparan dan akuntabel. Lemahnya sistem informasi manajemen dan dokumentasi institusional menyulitkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. (Nurindah, 2024) menekankan bahwa pengembangan kompetensi kepemimpinan harus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan yang memerlukan intervensi kepemimpinan yang sistematis dan berkelanjutan.

b) Tantangan Eksternal dan Kontekstual

Tantangan eksternal dalam implementasi *good governance* pada lembaga pendidikan Islam bersumber dari dinamika lingkungan yang kompleks dan cepat berubah. (Arar et al., 2022) melalui tinjauan sistematik literatur internasional mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam penelitian kepemimpinan pendidikan berbasis Islam meliputi kebijakan, reformasi, dan stakeholder, model dan gaya kepemimpinan pendidikan, serta gender, feminisme, dan keadilan sosial. Perubahan regulasi pemerintah, tuntutan akreditasi dan penjaminan mutu, serta kompetisi dengan lembaga pendidikan lain menuntut adaptasi yang cepat dari pemimpin pendidikan Islam. Tekanan ekonomi dan keterbatasan pendanaan eksternal membatasi kemampuan lembaga untuk mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang memadai. (Syahlarriyadi, 2023) menegaskan pentingnya pola pemikiran sistem yang akan memunculkan sikap profesional, transparan, dan akuntabel serta memiliki sifat *fatonah*, *sidiq*, *amanah*, dan *tabligh* yang pada akhirnya akan menjadi budaya kerja pemimpin institusional. Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pendidikan dan tata kelola yang baik menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Perubahan sosial-budaya, perkembangan teknologi, dan globalisasi pendidikan menciptakan tekanan eksternal yang menuntut inovasi dan adaptasi berkelanjutan dari kepemimpinan lembaga pendidikan Islam.

Tabel 3. Tantangan dan Strategi Solusi dalam Implementasi Good Governance

Jenis Tantangan	Deskripsi Spesifik	Strategi Solusi yang Direkomendasikan
Internal - SDM	Keterbatasan kompetensi manajerial dan teknologi	Pelatihan berkelanjutan, rekrutmen berbasis kompetensi
Internal - Budaya	Resistensi terhadap perubahan, kurangnya transparansi	Sosialisasi nilai-nilai, pembangunan kultur akuntabilitas
Internal - Konflik	Konflik antar stakeholder, dualisme kepemimpinan	Profesionalisme, musyawarah, sinkronisasi kepentingan
Eksternal - Kebijakan	Perubahan regulasi, tuntutan akreditasi	Sistem informasi yang adaptif, jaringan kebijakan
Eksternal - Ekonomi	Keterbatasan pendanaan, kompetisi institusi	Diversifikasi sumber dana, pengembangan nilai tambah
Eksternal - Sosial	Ekspektasi masyarakat, perubahan teknologi	Inovasi berkelanjutan, responsivitas terhadap kebutuhan

Sumber: Diolah dari (Alfiannur et al., 2022), (Mujib & Ali, 2022), (Arar et al., 2022), (Syahlarriyadi, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki peran fundamental dalam mewujudkan *good governance* pada lembaga pendidikan Islam melalui internalisasi nilai-nilai teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fondasi kepemimpinan Islami yang berlandaskan prinsip *amanah*, *al-'adalah*, *syura*, dan *uswah hasanah* terbukti memiliki keselarasan signifikan dengan prinsip *good governance* modern yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Implementasi *good governance* dalam lembaga pendidikan Islam memerlukan identifikasi dimensi dan indikator yang jelas, meliputi transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas kinerja, partisipasi *stakeholder*, serta efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Kepemimpinan berfungsi sebagai *change agent* yang transformatif dalam mengoperasionalkan prinsip *good governance* melalui mekanisme perencanaan strategis, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan yang sistematis. Namun, implementasi tersebut menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan kompetensi SDM, resistensi budaya organisasi, dan konflik *stakeholder*, serta tantangan eksternal meliputi perubahan regulasi, keterbatasan pendanaan, dan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Model kepemimpinan spiritual-transformasional terbukti menjadi pendekatan kontekstual

yang efektif dalam mengintegrasikan dimensi moral-spiritual dengan aspek manajerial untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan dan responsif.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemimpin lembaga pendidikan Islam mengembangkan kompetensi manajerial dan teknologi melalui program pelatihan berkelanjutan yang terintegrasi dengan nilai-nilai kepemimpinan profetik. Pengembangan sistem informasi manajemen yang transparan dan akuntabel perlu diprioritaskan untuk mendukung proses *monitoring* dan evaluasi kinerja institusional. Pembangunan budaya organisasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif *stakeholder* harus dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi nilai-nilai *good governance* dan mekanisme *syura* yang inklusif. Diperlukan sinkronisasi kepentingan antara yayasan, pimpinan, guru, dan masyarakat untuk mengatasi konflik internal melalui profesionalisme dan musyawarah. Untuk menghadapi tantangan eksternal, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan strategi diversifikasi sumber pendanaan, membangun jaringan kebijakan dengan *stakeholder* eksternal, dan meningkatkan daya saing melalui inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model kepemimpinan pendidikan Islam yang lebih spesifik pada berbagai konteks institusional serta mengembangkan instrumen pengukuran *good governance* yang mengintegrasikan indikator syariah dan manajemen modern secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Burhanuddin, S. A. (2023). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menciptakan Good Governance di Sekolah. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 413–418. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4538>
- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Alfiannur, M., Mof, Y., & Hermina, D. (2022). Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 123–135.
- Arar, K., Sawalhi, R., & Yilmaz, M. (2022). The Research on Islamic-Based Educational Leadership since. *Religions*, 13(42), 1–23.
- Astani, L. G. M. Z., Kojin, K., & Akhyak, A. (2024). Improving Educational Quality: The Leadership Role of Private Islamic College Leaders. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 9(08), 152–159. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2024.v09i08.002>
- Bahri, S. (2022). Meningkatkan Kualitas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Melalui Sumber Daya Manusia di Era Pandemi. *Munaddhomah*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i1.158>
- Bahri, S., Irwansyah, & Pahrudin, A. (2025). Hakikat Manajemen Pendidikan Islam untuk Tata-Kelola Universitas yang Baik (Good Governance University). *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2, 198–206.
- Ernawati, S., Saputra, H., Kurniawan, M. A., & Lampung, U. I. (2024). Islamic Education Management Strategy in the Digital Era : Governance Transformation to Increase Effectiveness and Accessibility. *International Journal of Islamic Educational Research*, 1(3), 28.
- Hamdanah, Mardia, & Rusydi, M. (2025). Visionary Leadership in Islamic Boarding Schools: Implications for Institutional Management within the Barakka Framework. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(8), 1041–1057. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.8.46>
- Handayani, T., Novyanti, E., Asha, L., & Warlizasusi, J. (2025). *Leadership Ethics in the Islamic Education System : A Theoretical and Practical Study in Educational Institutions*. March.
- Hifza, Suhardi, M., Aslan, & Ekasari, S. (2022). Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Kajian Islam. *NidhomulHaq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1–12.

- Khairani, T., & Hasibuan, Z. E. (2024). *Fungsi Pemimpin Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam*. 2(3), 513–518.
- Muhammad Nur Kurma. (2024). Model Kepemimpinan Spiritual-Transformasional dalam Penguatan Budaya Mutu di Lembaga Pendidikan Islam. *IslamicEdu Management Journal*, 1(2), 173–184. <https://doi.org/10.71259/ha7cr224>
- Mujib, A., & Ali, M. (2022). LEADERSHIP MANAGEMENT ISLAMIC EDUCATION Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. *International Journal of Islamic Religious*, 1(1), 18–26. <https://ejournal.amypublishing.com>
- Nurindah. (2024). *Fungsi Pemimpin Dalam Kepemimpinan Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 014668 Air Genting*. 2(1), 72–77.
- Rosalina, N., & Khoiri, Q. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Kultur Good Governance. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 14471–14477.
- Rusydi, I. (2023). Good Governance According To Islamic Perspective. *Munaddhomah*, 4(4), 1001–1007. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>
- Sari, M., & Khaidir, A. (2022). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6, 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Syahlarriyadi, S. (2023). the Role of Leaders of Islamic Educational Institutions in Increasing the Quality of Islamic Education in Madrasah. *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(September), 443–470. <https://doi.org/10.24853/pi.1.0.2023.443-470>
- Wahyudi, D., Cahya Ayu Kamila, & Agustin, S. W. (2021). Peran Kepemimpinan Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Syntax Transformation*, 9(1), 17–23. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.vi>[sres.2014.07.001](https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006)<https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>